

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (1997). *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis Pasca Sarjana, MAP, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anthony dan Govindarajan. (2003). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Arikunto. (2006). Kategori Pengetahuan. Diakses dari alamat: <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/104/jtptunimus-gdl-nurlailag2-5198-3bab2.pdf> pada tanggal 2 Oktober 2011
- Azwar, S. (2001). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2000). Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2001 Tentang *Standar Kompetensi Jabatan*. BKN. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Boyatzis, Richard, E. (2008). *Competencies in The 21st Century*. *Journal of Management Development*. Vol. 27 No. 1, pp. 5-12.
- Buyung Ahmad. (2007). Kompeten dan Kompetensi. 2 Oktober 2007 diakses dari <http://deroe.wordpress.com/2007/10/05/kompeten-dan-kompetensi/> pada tanggal 2 Oktober 2011.
- Farid Rachmad. (2009). Pengaruh Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Gordon. Pengertian Pengetahuan Menurut Para Ahli. Diakses dari alamat <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2197076-pengertian-pengetahuan-menurut-para-ahli/#ixzz1bl0vYo7l> pada tanggal 2 Oktober 2011.
- Halim. A, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakir Hesein. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi. UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hairr et al. (1998). *Multivariate Data Analisis*. Fifth Edition. Prentice-Hall International, New Jersey.
- Iman Abdurachman. (2009). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah*. Program Sarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Indradi dan Syamsiar. (2001). *Pengaruh Pendidikan & Pengalaman Anggota DPRD Dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang (tidak dipublikasikan).
- Jaka Winarna dan Sri Murni. (2006). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanudin, 26-28 Juli 2007.
- Jogiyanto. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman*. Edisi 2007. BPFE, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 *Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 *Tentang Buku Pedoman Pengembangan Budaya Kerja*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2001). Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. No.3. Volume 2. Halaman 441-456.
- Mustopadidjaja. (2005). *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Belajar)*, Jakarta: LAN & Duta Pertiwi Foundation.
- Notoadmodjo. (2003). Pengertian Pengetahuan. Diakses dari alamat <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/104/jtptunimus-gdl-nurlailag2-5198-3bab2.pdf> pada tanggal 2 Oktober 2011
- Nyoman Rudana. (2005). *Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. STIA LAN. Jakarta.
- Pramono, Agus H. (2002). *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Padang (tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia. (2004). *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. (1998). Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 *Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan berbagai Peraturan Perundang-undangan baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2001). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Fokus Media,

Bandung.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

Rima Rosseptalia. (2006). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Santoso, Singgih. (2003). *Buku Latihan Statistik Parametrik*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sekaran, Uma. (1992). *Business Research Methods*. Mc.Graw-Hill Book Company, Inc., New York.

Sharma, S. Richard. M. Durand, and O. Gur-Arie. "Identification and Analysis of Moderator Variables." *Journal of Marketing Research*, 18 (8) Aug, pp.291.61.

Sinuraya, Candra. (2009). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap

Kinerja Managerial dengan Variabel Moderating *Job-Relevant Information* dan Kecukupan Anggaran. *Jurnal Akuntansi*. No.1. Vol.1 hal.17-39.

Sopanah dan Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang*, hal. 1160-1173.

Spencer, Lyle M. Jr and Signe M., Spencer. (1993). *Competence at Work Models for Superior Performance*, New York, John Willey & Sons, Ic.

Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Kelima belas. Alfabeta, Bandung.

Sutamoto, Tejo. (2002). *Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai*. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang (tidak dipublikasikan).

Yudono, Bambang. (2002). *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2011, dari alamat: <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela3.html>

Zainuddin et al. (2002). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<http://www.dprd-bandungkota.go.id> diunduh pada tanggal 6 November 2011

<http://dprd.jabarprov.go.id> diunduh pada tanggal 6 November 2011

<http://www.ideelok.com/politik/pemilihan-umum-anggota-dpr-dpd-dan-dprd/seluruh-halaman> diunduh pada tanggal 6 November 2011